

BAB II

HUBUNGAN ANTARA JAWA TENGAH DAN QUEENSLAND

Bab ini dibagi menjadi beberapa sub-bab untuk membedah hubungan antara Jawa Tengah dan Queensland. Sub-bab pertama membahas bagaimana Queensland dapat menjadi mitra kerja sama *Sister Province* Jawa Tengah. Pada sub-bab kedua membahas dinamika kerja sama *Sister Province* Jawa Tengah dan Queensland baik sebelum dan saat Pandemi Covid-19.

2.1. Sejarah Hubungan Jawa Tengah dan Queensland

Hubungan antara Jawa Tengah dan Queensland sudah terjalin lebih dari 3 dekade terhitung sejak tahun 1992 hingga 2024 (Pemprov Jateng, 2024). Tonggak awal dari hubungan kedua daerah ini terjalin pada tahun 1992 pada saat pengesahan MoU kerja sama *Sister Province* periode 1992-1997. MoU tersebut ditandatangani oleh H. M. Ismail selaku Gubernur Jawa Tengah dan Wayne Goss selaku Premier Negara Bagian Queensland (Masrohatun, 2018). Kerja sama ini erat kaitannya dengan politik luar negeri Australia pada dekade 70-an hingga 90-an

Australia mengawali dekade 70-an dengan melakukan politik luar negeri yang lebih aktif dari sebelumnya. Hal ini dikarenakan status Australia sebagai sebuah negara “Eropa” yang terdampar di sudut Benua Asia, jauh dari negara-negara sekutunya. Australia merespon dengan tiga cara: (1) tetap menjalin kerja sama dengan sekutu Australia; (2) memainkan peran yang lebih aktif di kawasan Asia-Pasifik untuk mengatasi ancaman geopolitik¹; (3) mendorong institusi, norma,

¹ Perebutan penguasaan geografis yang berdimensi internasional dan global, serta pemanfaatan unsur geografis tersebut untuk keuntungan politik (Flint, 2006)

dan rezim internasional² untuk menghindari politik kekuasaan yang akan merugikan Australia (Joshi, 2017).

Langkah awal Australia dalam politik regional adalah dengan memberikan bantuan luar negeri pada negara-negara Pasifik. Bantuan luar negeri ini ditujukan untuk pembangunan negara-negara pasifik yang masih ditahap negara berkembang. Namun disatu sisi Australia justru enggan untuk terlibat dalam politik wilayah pasifik dan cenderung membatasi dirinya dengan urusan negara-negara Pasifik (West, 2019). Meskipun begitu, Australia tetap pada komitmen mereka dengan memberikan bantuan luar negeri hingga saat ini. Tercatat pada tahun 2023, Australia mengirimkan sebanyak \$613.2 juta kepada negara-negara Pasifik (DFAT, 2024).

Hubungan Australia dengan negara-negara Asia jauh lebih aktif daripada negara-negara Pasifik. Awal hubungan Australia dengan Asia terjadi ketika Gough Whitlam, perdana menteri Australia dari Partai Buruh, menjalin hubungan dengan partai komunis China. Kebijakan luar negeri Whitlam juga cenderung menganut aliran kiri, karena berasal dari partai buruh. Contohnya ketika Australia menarik pasukannya dari perang vietnam pada tahun 1972 (West, 2019). Hubungan antara Whitlam dengan China dan Vietnam membuat kebijakan luar negeri Australia lebih berfokus pada wilayah Asia yang kemudian diteruskan oleh perdana menteri selanjutnya.

² kerangka kerja sama yang terdiri dari serangkaian prinsip, norma, aturan, dan prosedur untuk mengatur interaksi antar negara dalam suatu bidang tertentu

William Fraser, perdana menteri Australia setelah Whitlam, juga menjalin hubungan dengan negara-negara Asia. Ketika terpilih pada tahun 1976, kunjungan luar negeri pertama Fraser adalah Beijing dan Tokyo (Curran, 2015). Hal tersebut memberikan pesan yang jelas bahwa absennya sekutu Australia menimbulkan urgensi baru akan perlunya belajar bekerja sama dengan negara-negara Asia. Berbeda dengan Whitlam, Fraser justru memandang bahwa hubungan dengan negara-negara Asia ditujukan untuk menjaga keamanan wilayah Australia (Dobell, 2015).

Perubahan fokus kembali terjadi ketika Bob Hawke terpilih menjadi perdana menteri Australia. Politik luar negeri Hawke seolah-olah memperbaiki apa yang dilakukan pendahulunya dengan menghadirkan pendekatan yang lebih kolaboratif terhadap negara-negara Asia-Pasifik. *Asia Pacific Economy Cooperation* (APEC) merupakan hasil dari upaya Hawke untuk membujuk negara-negara di Asia dan Pasifik untuk bergabung secara ekonomi. Pada tahun 1989, ia memberikan pidato di Seoul, Korea Selatan. Hawke berhasil mengundang dua belas negara Asia-Pasifik ke sebuah pertemuan di Canberra, di mana APEC secara resmi didirikan. Menurut laman resmi APEC (2023), anggota pertama adalah negara-negara berikut ini: Australia, Brunei Darussalam, Kanada, Indonesia, Jepang, Korea Selatan, Malaysia, Selandia Baru, Singapura, Thailand, dan Filipina. Kerja Sama Ekonomi ini didirikan dengan tujuan untuk mendorong pembangunan dan kemakmuran ekonomi regional. Hasilnya perdagangan dan investasi di kawasan Asia-Pasifik dapat menjadi lebih terbuka dan bebas.

Secara tidak langsung pembentukan APEC menjadi pondasi bagi hubungan antara Jawa Tengah dan Queensland. Ketika Paul Keating, mantan menteri keuangan sekaligus salah satu orang yang berperan dalam pembentukan APEC, terpilih menjadi perdana menteri Australia menggantikan Hawke. Keating memilih Indonesia sebagai kunjungan luar negeri pertamanya pada tahun 1991. Keating sangat terkesan dengan Indonesia karena merupakan negara besar yang dekat dengan Australia. Keating berkata bahwa tidak ada negara yang lebih penting bagi Australia selain Indonesia (West, 2019). Hal tersebut dipandang sebagai peluang untuk mempromosikan dan mengembangkan potensi yang ada di Jawa Tengah.

Komunikasi awal Jawa Tengah dengan Australia mulai dirintis pada Tahun 1991 oleh Soesmono yang pada saat itu merupakan kepala BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah) Jawa Tengah, atau saat ini disebut DPMPTSP (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu). Komunikasi ini ditujukan untuk membangun kerja sama antara Jawa Tengah dan Australia. Kemudian terpilihlah Queensland sebagai mitra kerja sama *Sister Province* dengan Jawa Tengah. Queensland terpilih lantaran adanya kesamaan potensi dengan wilayah Jawa Tengah sehingga diharapkan dapat berkolaborasi bersama untuk meningkatkan potensi kedua wilayah tersebut (Sururi, 2008).

Jawa Tengah dan Queensland menjalin kerja sama *Sister Province* untuk meningkatkan potensi masing-masing wilayah salah satunya adalah potensi ekonomi. Queensland adalah salah satu negara bagian di Australia dengan pertumbuhan ekonomi yang pesat. Pada dekade 90-an Queensland merupakan negara bagian dengan pertumbuhan ekonomi paling pesat di Australia. Antara tahun

1991-92 dan 2001-02 pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Queensland mengungguli semua negara bagian dengan angka pertumbuhan rata-rata 5,0% setiap tahun, sementara pertumbuhan PDB Australia meningkat rata-rata 3,9% setiap tahun. Pertumbuhan tahunan rata-rata untuk seluruh negara bagian Australia antara tahun 1991-92 hingga 2001-02 dipengaruhi oleh resesi ekonomi pada awal tahun 1990-an (ABS, 2003).

Alasan mengapa pertumbuhan di Queensland lebih kuat dibandingkan dengan Australia mungkin disebabkan oleh pertumbuhan populasi, migrasi domestik maupun internasional maupun, produktivitas tenaga kerja, tingkat pajak yang lebih rendah, pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga, dan pengeluaran investasi swasta (ABS, 2003). Perekonomian Queensland yang kuat menarik Jawa Tengah untuk bekerja sama, mendorong pertumbuhan ekonomi dan hubungan perdagangan. Selain perekonomian, pendidikan merupakan hal yang potensial bagi kerja sama Jawa Tengah dan Queensland

Secara garis besar, pendidikan di Queensland tidak jauh berbeda dengan Jawa tengah. Tingkat pendidikan dibagi menjadi tiga tingkatan yakni sekolah dasar, sekolah menengah, perguruan tinggi (Sururi, 2008). Hal unik dari pendidikan Queensland adalah menggunakan pendekatan Pedagogi Produktif yang berawal dari temuan Queensland School Reform Longitudinal Study (QSRLS)³ (Lingard & Ladwig, 2001). Berdasarkan studi QSRLS alasan utama pengembangan Pedagogi Produktif adalah untuk menyediakan semacam alat yang dapat digunakan guru

³ QSRLS adalah proyek penelitian komprehensif yang dimulai pada tahun 1997 oleh Education Queensland

untuk meningkatkan hasil belajar siswanya, baik akademik maupun sosial. Pedagogi Produktif memiliki fokus pada peningkatan penalaran intelektual siswa dan menjadikan proses belajar mengajar di sekolah dapat diterapkan dalam kehidupan siswa sehari-hari (Alsharif & Atweh, 2012). Selain memiliki Inovasi pendidikan yang baik, Queensland juga memiliki ketertarikan dengan Bahasa Indonesia. Pada tahun 1966 Kementrian Pendidikan Australia pertama kali memperkenalkan Bahasa Indonesia di sekolah menengah Australia, kemudian Bahasa Indonesia dengan cepat menjadi bahasa Asia yang penting dalam sistem sekolah Australia (Slaughter, 2007). Beberapa sekolah dan perguruan tinggi di Queensland memiliki program pembelajaran Bahasa Indonesia seperti Ferny Grove State High School (EQI, 2024) dan University of Queensland (UQ, 2024). Terakhir, yang menjadi keunggulan dari Queensland adalah peternakan, terutama peternakan sapi.

Queensland memiliki industri peternakan sapi terbesar di Australia, yaitu 42% dari ternak sapi nasional (Ernst and Young Australia Operations Pvt, 2018). Queensland juga mempunyai reputasi yang sangat baik karena memiliki industri peternakan yang bersih, aman, dan diproduksi secara etis. Hal tersebut didapat melalui penelitian, riset ilmiah, dan praktik produksi kelas dunia. Hasilnya industri daging sapi di Queensland bebas dari banyak penyakit sapi yang paling serius, seperti penyakit mulut dan kuku dan *bovine spongiform encephalopathy*⁴, menjadikan produk daging sapi dari Queensland termasuk yang paling aman di

⁴ *Bovine Spongiform Encephalopathy* (BSE) atau disebut juga Penyakit Sapi Gila, merupakan penyakit progresif dan fatal pada sistem saraf

dunia (Business Queensland, 2022). Daging sapi adalah salah satu komoditi ekspor terbesar di Queensland yang bernilai \$7,1 M dan dikonsumsi di lebih dari 60 negara di seluruh dunia (TIQ, 2024). Potensi-potensi Queensland di bidang Ekonomi, Pendidikan, dan Peternakan ini yang kemudian akan menjadi program-program kerja sama Jawa Tengah dan Queensland.

2.2. Dinamika Hubungan *Sister Province* Jawa Tengah dan Queensland

Sister Province Jawa Tengah dan Queensland ditujukan untuk memperkuat kerja sama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi serta menguatkan potensi daerah. Melalui kerja sama ini kepentingan bersama dapat saling terwujud dan memperkuat hubungan kedua belah pihak. *Sister Province* Jawa Tengah dan Queensland telah berlasung selama lebih dari 3 dekade terhitung sejak tahun 1992 hingga tahun 2024.

Tujuan dibentuknya MoU *Sister Province* Jawa Tengah dan Queensland dimuat dalam pasal 1 yang menyatakan bahwa tujuan dari MoU ini untuk menjalin kerja sama yang saling menguntungkan antara kedua belah pihak. Cakupan kerja sama *Sister Province* tertulis pada MoU pasal 2 yakni Ekonomi, Ekspor Impor, Investasi; Pendidikan; Kepelatian; Kesehatan; serta Kebudayaan dan Pariwisata. Pasal 3 memuat peraturan teknis yang mencakup penyusunan rencana kerja untuk memfasilitasi pelaksanaan MoU, dengan rincian kegiatan sesuai ruang lingkup kerja sama di pasal 2. Para pihak dapat mengundang pihak ketiga yang relevan untuk ikut serta dalam implementasi MoU guna menciptakan kerja sama yang saling menguntungkan. Rencana kerja ini harus ditandatangani paling lambat 6 (enam) bulan setelah tanggal penandatanganan MoU.

MoU *Sister Province* Jawa Tengah dan Queensland ini menjadi landasan yang kuat bagi kerja sama di berbagai bidang dengan menetapkan tujuan, ruang lingkup kerja sama, dan peraturan teknis pelaksanaannya. Hal ini akan memungkinkan kedua belah pihak untuk bekerja sama secara efektif dan berkelanjutan. Dalam pelaksanaannya kerja sama ini mengalami banyak dinamika.

2.2.1. Pasang Surut Hubungan Jawa Tengah dan Queensland.

Pada awal kerja sama antara Jawa Tengah dan Queensland, program kerja sama difokuskan pada sektor-sektor potensial Jawa Tengah seperti Ekonomi, Pendidikan dan Pelatihan, serta Peternakan. Untuk sektor seperti Pariwisata dan Kesehatan, pada periode ini Pemerintah Jawa Tengah belum memfokuskan pada sektor tersebut dan hanya ada sedikit program seperti Pertukaran staf ahli konservasi dan Pariwisata serta kerja sama pengembangan agro wisata Sodong (Sururi, 2008).

Kerja sama ekonomi antara Jawa Tengah dan Queensland dimulai dengan pembukaan pusat informasi Queensland di BPKMD Jawa Tengah dan *Central Java Information Centre* di Milton Street, Brisbane. Selanjutnya, keduanya memulai program kerja sama bisnis, seperti pembangunan rumah potong hewan modern oleh PT. Abilowo Djaya Cattle di Salatiga dan EFIC Australia pada 1992, serta perjanjian peningkatan fasilitas telepon antara Telstra Australia MGTI dan PT. Telkom di Jawa Tengah senilai US\$ 150.000,00 selama 15 tahun. Kerja sama pendidikan diawali dengan perjanjian pendidikan antara Queensland dengan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah, diikuti oleh pertukaran pelajar antara beberapa

SMA dan universitas di kedua provinsi serta program pertukaran guru bahasa Indonesia dan Inggris.

Kerja sama di bidang peternakan dimulai dengan pembentukan komisi peternakan yang melibatkan Kepala Dinas Peternakan Jawa tengah, Kepala Kanwil Perdagangan Jawa Tengah, Ketua BPKMD Jawa Tengah, dan Direktur Utama BPD Jawa Tengah. Komisi peternakan ini akan menyediakan program seperti pengembangan karantina ternak, impor bibit sapi dari Queensland, pendirian rumah potong hewan, dan pertukaran staff ahli. Pemerintah Queensland juga memberikan bantuan sebesar US\$ 10 juta per tahun untuk sektor pertanian (Windiani, 2007). Dapat dikatakan kerja sama antara Jawa Tengah dan Queensland di tahap awal mengalami keberhasilan dengan dilaksanakannya beberapa program strategis.

Hubungan Jawa Tengah dan Queensland sempat mengalami kendala karena adanya ketegangan antara Indonesia dan Australia. Pada Tahun 2003 terjadi tragedi bom bali di kota Denpasar yang menewaskan 202 orang termasuk 88 warga negara Australia (NMA, 2022). Tidak lama setelah kejadian bom bali pemerintah Australia membuat kebijakan larangan perjalanan dari Australia ke Indonesia untuk sementara waktu. Kebijakan tersebut berpengaruh terhadap beberapa program yang sedang dilaksanakan oleh Jawa Tengah dan Queensland seperti program pertukaran guru dan pelajar. Program yang sudah dilaksanakan sejak tahun 1992 ini sempat terhambat karena kebijakan larangan perjalanan. Selama tahun 2003 hingga 2006 Queensland sama sekali tidak mengirimkan pelajar dan guru ke Jawa Tengah. Selain itu program baru seperti promosi pariwisata juga batal terlaksana (Windiani, 2007).

Kondisi politik dalam negeri Indonesia juga memiliki dampak terhadap kerja sama Jawa Tengah dan Queensland. Pada akhir dekade 90-an hingga awal dekade 2000-an terjadi transisi dari pemerintahan orde baru menuju pemerintahan reformasi. Selama periode transisi ini Pemerintah Indonesia mengamandemen konstitusi serta mengeluarkan kebijakan-kebijakan baru (Jadidah, 2020).

Salah satu kebijakan yang berdampak bagi Jawa Tengah adalah kebijakan otonomi daerah. Pemerintah Indonesia menerbitkan UU No. 32 tahun 2004 tentang Otonomi Daerah yang pemberian otonomi daerah menganut prinsip otonomi yang seluas-luasnya, nyata, dan bertanggung jawab (Sufianto, 2020). Hal ini mengindikasikan bahwa sistem desentralisasi sedang dipertimbangkan oleh pemerintah Indonesia⁵.

Pemerintah Indonesia kemudian mengesahkan undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Undang-undang ini menetapkan bahwa Desentralisasi Fiskal diikuti ketika otonomi daerah diberlakukan⁶. Dengan adanya desentralisasi fiskal Pemerintah daerah mempunyai kewenangan membuat keputusan pembelanjaan dan pendanaan-nya secara mandiri serta Pemerintah Daerah memiliki tanggung jawab untuk membiayai pelayanan atau program-nya secara mandiri (Bahl & Birth, 1999).

Pemerintah Jawa Tengah memiliki kewenangan untuk mengontrol distribusi dana untuk pelayanan masyarakat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dengan diterapkannya otonomi daerah yang baru maka

⁵ penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus pemerintahan dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia.

⁶ Pemerintah pusat memberikan wewenang pada pemerintah daerah untuk mengelola keuangan secara mandiri (Gedeona, 2009).

semua program kerja sama Jawa Tengah dan Queensland kini menggunakan APBD Jawa Tengah. Dalam periode ini kerja sama Jawa Tengah dan Queensland justru menemui berbagai masalah. Beberapa program di bidang perternakan dan bidang industri tidak dapat terlaksana karena kurangnya dana dari APBD. Selain itu Kerja sama Bidang perdagangan tidak dilanjutkan karena neraca perdagangan minus dan peluang pasar relatif kecil (Windiani, 2007). Kerja sama Jawa Tengah dan Queensland sempat berjalan kurang efektif, namun kedua belah pihak justru sepakat ingin memperpanjang kerja sama ini.

Jawa Tengah dan Queensland masih memiliki harapan dan semangat untuk bekerja sama. Oleh karena itu, pada tahun 2007 kerja sama ini tetap dilanjutkan dengan penandatanganan MoU periode 2007-2012. MoU ini ditandatangani oleh Peter Beattie selaku Premier Queensland dan Wakil Gubernur Jawa Tengah H. Ali Mufiz. MoU ini diharapkan akan melanjutkan program pertukaran guru pelajar. Queensland juga memandang Jawa Tengah sebagai mitra yang menguntungkan lantaran Jawa Tengah menyumbang 2,3 persen dari total ekspor barang dagangan Queensland pada tahun 2005-2006 (Williams, 2007). Kepercayaan Queensland terhadap Jawa Tengah membuat hubungan *Sister Province* ini dapat tetap berlanjut. Kemudian Jawa Tengah dan Queensland berfokus pada bencana yang tengah melanda Jawa Tengah yakni gempa DIY dan Jawa Tengah⁷.

Jawa Tengah dan Queensland berperan penting dalam pemulihan pasca bencana gempa DIY dan Jawa Tengah dengan menyalurkan bantuan yang diberikan

⁷ 27 Mei 2006, pukul 05.54 WIB gempa berkekuatan 5,9 skala richter mengguncang Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan sebagian wilayah di Jawa Tengah.

oleh Australia. Pada tahun 2006, setelah gempa terjadi di DIY dan Jawa Tengah, Australia melalui AusAID memberikan dana sebesar 200 M (Salim, 2006). Dana tersebut kemudian dibagikan kepada usaha kecil di Jawa Tengah yang terdampak gempa (Neufeld & Salim, 2009) serta digunakan untuk membuat sekolah baru di Klaten bekerja sama dengan Muhammadiyah (Lestari, 2008).

MoU Jawa Tengah dan Queensland kemudian diperpanjang kembali pada tahun 2013 (Masrohatun, 2018). Selama periode ini Jawa Tengah mengirimkan beberapa guru ke University of Southern Queensland. Jawa Tengah juga menerima kunjungan dari kunjungan delegasi Griffith University dalam rangka meningkatkan hubungan kerja sama bidang pendidikan dan penelitian dengan beberapa perguruan tinggi yakni UNDIP, UKSW, UNS, dan STIFAR. Jawa Tengah dan Queensland juga melakukan pertukaran tenaga medis serta memberikan beasiswa bagi 12 tenaga perawat untuk mengikuti kursus pengembangan kurikulum pendidikan keperawatan yang berstandar internasional di Queensland University of Technology (Sari, 2016).

Hubungan Jawa Tengah dan Queensland sejauh ini baik ditunjukkan pada kedua pihak yang rutin melakukan program kerja sama. Hal tersebut didukung oleh pernyataan dari Ibu Eka Agustine Wynarningsih selaku kepala sub-bagian Kerja sama Luar Negeri (KSLN) Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah, dan Kerja sama Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah

Hubungan kita selama ini baik-baik saja. Dari tahun 1991 penandatanganan LoI kemudian dilanjut dengan MoU hubungan Jawa Tengah dan Queensland berjalan dengan baik... (Wawancara, 03 Juni 2024)

Hubungan antara Jawa Tengah dan Queensland juga saling menguntungkan sebab Jawa Tengah menjadi salah satu mitra dagang utama bagi Australia selama beberapa tahun terakhir. Berdasarkan data dari BPS Jawa Tengah (2021) ekspor Jawa Tengah ke Australia pada tahun 2018 mencapai angka sebesar 164.5 Juta USD. Adapun nilai impor pada tahun 2018 mencapai angka sebesar 205 Juta USD. Capaian ini menunjukkan bahwa Australia merupakan negara yang strategis bagi Jawa Tengah, maka dari itu kerja sama dengan Queensland akan membawa keuntungan materi bagi Jawa Tengah.

Queensland juga rutin melakukan ekspor dengan Indonesia. Mayoritas komoditas ekspor Queensland ke Indonesia adalah bahan makanan dan binatang hidup seperti hewan ternak, daging hewan, ikan, sayur, gandum, kopi, gula, dan lain-lain. Menurut data dari *Trade and Investment Queensland* atau TIQ ekspor bahan makanan dan binatang hidup dari Queensland ke Indonesia mengalami kenaikan yang stabil.

**Tabel 2.1 Ekspor komoditas bahan makanan dan binatang hidup
Queensland ke Indonesia**

Tahun	Jumlah Valuasi dalam AUD	Jumlah Valuasi dalam IDR
2013 – 2014	265.211.888	2.733.758.503.842
2014 – 2015	281.269.924	2.899.281.975.663
2015 – 2016	304.680.668	3.140.595.896.294
2016 – 2017	379.330.050	3.910.068.880.285
2017 – 2018	358.545.822	3.695.828.634.610
2018 – 2019	373.736.417	3.852.410.673.873

Sumber : *Trade and Investment Queensland* (2024)

Ekspor komoditas ini didominasi oleh ekspor daging sapi dan sapi potong. Komoditas tersebut merupakan ekspor unggulan dari Queensland. Jawa Tengah sendiri merupakan tujuan ekspor utama bagi komoditas sapi potong. Hal ini

ditunjukkan dengan data dari BPS yang menunjukkan bahwa Jawa Tengah merupakan importir utama komoditas sapi potong dari Queensland.

Tabel 2.2 Ekspor komoditas sapi potong Queensland ke Indonesia

Tahun	Jumlah Valuasi dalam AUD	Jumlah Valuasi dalam IDR
2013 – 2014	95.976.740	989.311.720.242
2014 – 2015	131.621.591	1.356.732.710.584
2015 – 2016	123.521.912	1.273.242.613.245
2016 – 2017	147.916.748	1.524.700.384.870
2017 – 2018	127.856.002	1.317.917.667.155
2018 – 2019	172.294.870	1.775.985.871.458

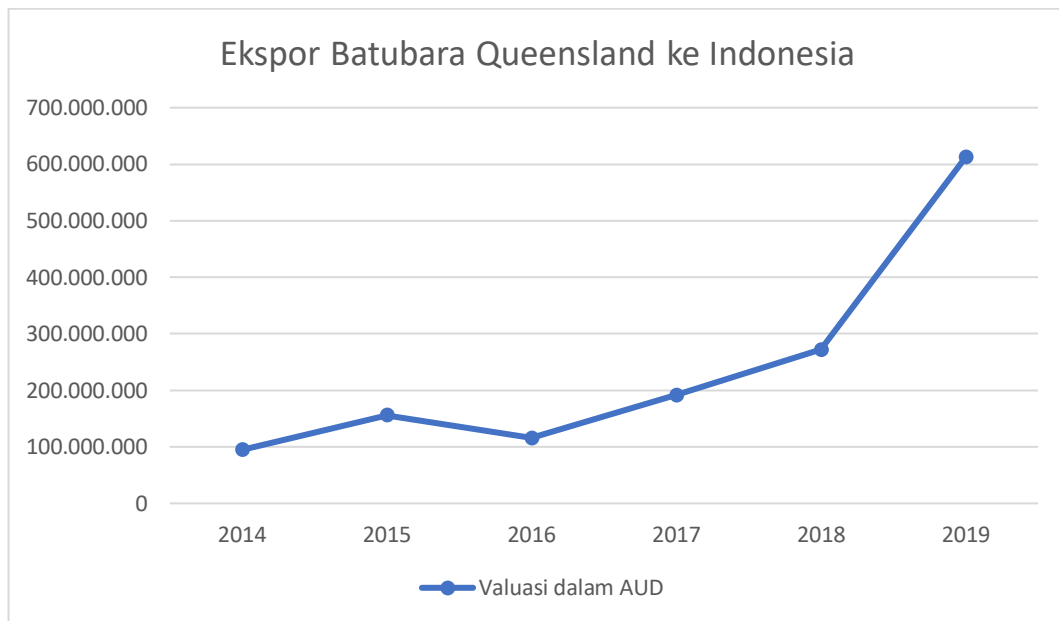
Sumber : Trade and Investment Queensland (2024)

Tabel 2.3 Impor komoditas sapi potong Jawa Tengah

Tahun	Jumlah Valuasi dalam AUD	Jumlah Valuasi dalam IDR
2013 – 2014	40.056.149	412.891.891.029
2014 – 2015	26.823.058	276.487.466.152
2015 – 2016	26.710.525	275.327.495.352
2016 – 2017	19.652.468	202.574.258.347
2017 – 2018	24.440.405	251.927.489.035
2018 – 2019	18.251.197	188.130.198.010

Sumber : Badan Pusat Statistik Jawa Tengah

Meskipun dalam tabel diatas jumlah impor sapi potong mengalami penurunan, Queensland tetaplah menjadi eksportir utama dalam komoditas sapi potong Jawa Tengah (BPS Jateng, 2019). Selain komoditas tersebut, Queensland juga memiliki komoditas unggulan lain yakni batubara. Berdasarkan data dari TIQ (2024) Ekspor batu bara Queensland mengalami kenaikan yang positif selama tahun 2017 hingga 2019. Kenaikan ini diperkirakan karena adanya pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) baru di beberapa daerah di Indonesia. Dengan adanya beberapa PLTU baru kebutuhan Indonesia terhadap batubara juga meningkat.

Grafik 2.1

Sumber : Trade and Investment Queensland (2024)

Di Provinsi Jawa Tengah terdapat proyek PLTU baru yakni PLTU Batang yang akan menyuplai sejumlah kebutuhan listrik bagi Pulau Jawa dan Bali (Fikri, 2018). Kehadiran PLTU ini nantinya akan memberi peluang bagi ekspor batubara Queensland lantaran Jawa Tengah juga membutuhkan pasokan batu bara bagi PLTU Batang. Selain ekspor dan impor, Queensland juga melakukan investasi di Jawa Tengah serta terdapat beberapa perusahaan Australia yang melakukan investasi di Jawa Tengah seperti PT. Keramco Jawa Tengah, PT. Remco Furniture, dan PT. Anggun Sasmita. Ketiga Perusahaan tersebut merupakan perusahaan asal Queensland dengan total investasi senilai Rp 5,5 Milyar (Pramono, 2009). Pada tahun 2019 Queensland menargetkan investasi ke Jawa tengah sebesar 15 – 20 juta USD (Hafiyyan, 2019)

Hubungan baik dan saling menguntungkan antara Jawa Tengah dan Queensland membuat kedua daerah ini kembali memperpanjang MoU kerja sama

untuk periode 2019 – 2024. Akan tetapi Hubungan Jawa Tengah dan Queensland kembali renggang karena Pandemi Covid-19, akibatnya banyak sekali program kerja sama yang dapat terlaksana selama periode ini.

2.2.2. Hubungan Jawa Tengah dan Queensland ketika Pandemi Covid-19

Kerja sama Jawa Tengah dan Queensland sempat terhenti lantaran masing-masing pihak terlalu sibuk menangani kasus Covid-19 di wilayahnya. Baik Jawa Tengah dan Queensland melakukan segala upaya untuk melawan Pandemi Covid-19 di wilayahnya. Hal ini sesuai dengan penjelasan dari Ibu Eka yang menyatakan

Selama pandemi dari mulai awal hingga akhir sebagaimana kita ketahui semua membutuhkan perhatian. Semua negara berusaha untuk survive dan juga berusaha untuk bisa keluar dari situasi darurat ... (Wawancara, 03 Juni 2024).

Pemerintah Jawa Tengah melakukan berbagai upaya seperti mengikuti anjuran pemerintah pusat dengan melaksanakan Protokol Kesehatan bagi Masyarakat 5M, yaitu Memakai masker, Mencuci tangan dengan sabun, Menjaga jarak, Menjauhi kerumunan, dan Membatasi mobilitas. Protokol kesehatan ini dianggap efektif dalam menekan penyebaran virus Covid-19 (Majid, 2021). Pemerintah Jawa Tengah juga melaksanakan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) di tahun 2020 dan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) di tahun 2021.

Gubernur Jawa Tengah, Bapak Ganjar Pranowo dalam CNBC (2020) mengatakan bahwa pelaksanaan PSBB dilakukan untuk menekan angka kasus Covid-19 sehingga pembatasan kegiatan masyarakat perlu dilakukan sampai kasus Covid-19 menurun. Selain itu, Bapak Ganjar juga mengusulkan gerakan Jateng di Rumah Saja untuk lebih menekan angka penyebaran virus di wilayah Jawa Tengah (Humas Jateng, 2021).

Pemerintah Jawa Tengah meningkatkan kapasitas pelayanan kesehatan seperti meningkatkan ketersediaan alat pelindung diri (APD) yang memadai (Humas Jateng, 2020), menambah alat pendeteksi Covid-19 dan mendorong vaksin Covid-19 di masyarakat (Firdaus, 2023). Pemerintah Jawa Tengah juga aktif melakukan komunikasi dengan Mitra *Sister Province*-nya seperti Fujian dan Chungcheongbuk-do. Melalui komunikasi tersebut Jawa Tengah berhasil mendapatkan beberapa bantuan alat untuk mendukung tenaga medis seperti 3000 pcs baju hazmat, 2 mesin *airway positive Breathcare* PAP, 5 pcs *patient monitor*, 5 pcs *oxygen concentrator* dari Fujian serta bantuan 110.000 pcs masker KF94 dari Chungcheongbuk-do (Nugroho et al., 2023).

Pemerintah Jawa Tengah mengimplementasikan Instruksi Gubernur tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) untuk mengendalikan penyebaran virus di Provinsi Jawa Tengah. Instruksi ini juga diikuti dengan ketentuan *Work From Home* (WFH)⁸, mengaktifkan Satuan Tugas Jogo Tonggo, tujuan utamanya adalah untuk memastikan pemantauan dan penanganan Covid-19 secara efektif dengan memberdayakan masyarakat setempat untuk saling membantu dan mendukung dalam menghadapi Pandemi Covid-19 (Dukcapil Jateng, 2020). Selain itu, sektor pendidikan juga harus menyesuaikan diri. Universitas dan sekolah di seluruh Indonesia menerapkan kebijakan *Study From*

⁸ Sistem kerja yang memungkinkan karyawan untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab pekerjaan mereka dari rumah atau tempat tinggalnya, tanpa harus datang ke kantor. Sistem ini memanfaatkan teknologi untuk komunikasi dan koordinasi kerja, seperti email, video conference, dan berbagai aplikasi kolaborasi online.

*Home*⁹ untuk meminimalisir penyebaran virus di lingkungan pendidikan. Langkah ini dianggap penting untuk menjaga keselamatan siswa dan staf pengajar selama Pandemi Covid-19. Namun, ada beberapa institusi pendidikan yang masih melakukan pembelajaran tatap muka, salah satunya adalah Pondok Pesantren.

Pada bulan Juni tahun 2020, beberapa pondok pesantren di Jawa Tengah telah memulai kembali pembelajaran tatap muka dengan tetap mematuhi protokol kesehatan yang ketat. Beberapa orang tua santri mendukung keputusan ini karena mereka merasa bahwa penerapan *Study From Home* tidak efektif dibandingkan dengan pembelajaran tatap muka. Mereka berpendapat bahwa interaksi langsung antara guru dan siswa sangat penting untuk proses belajar mengajar yang optimal. Selain itu, mereka merasa tenang karena pembelajaran di pondok pesantren dilakukan dengan protokol kesehatan yang ketat, seperti penggunaan masker, cuci tangan, dan menjaga jarak. Di sisi lain, masyarakat sekitar pondok pesantren merasa khawatir dengan kebijakan ini. Mereka berpendapat bahwa pembelajaran tatap muka memiliki risiko tinggi dalam penyebaran Covid-19, meskipun dengan penerapan protokol kesehatan. Kekhawatiran ini didasarkan pada potensi interaksi yang sulit dikendalikan di lingkungan yang padat, yang dapat meningkatkan risiko penularan virus (Pansus, 2020).

Secara bertahap pelaksanaan PSBB dan PPKM pada akhirnya dapat menurunkan angka kasus Covid-19 meskipun mengalami banyak rintangan (Zainal, 2021). Akan tetapi, pelaksanaan PSBB dan PPKM memberikan konsekuensi

⁹ Metode pembelajaran di mana siswa mengikuti kegiatan belajar mengajar dari rumah, biasanya melalui platform online. Ini diterapkan ketika ada situasi mendesak yang memerlukan siswa untuk tidak hadir secara fisik di sekolah, seperti pandemi COVID-19.

terhadap terbatasnya kegiatan ekonomi yang menyebabkan ketidakseimbangan perekonomian Indonesia. Banyak orang yang mengalami pengurangan jam kerja hingga pemutusan hubungan kerja yang mengakibatkan bertambahnya angka pengangguran.

Pembatasan aktivitas masyarakat juga berakibat pada usaha-usaha kecil di mana banyak sekali usaha kecil mengalami penurunan drastis dalam pendapatan dan ada beberapa yang terpaksa gulung tikar karena tidak mampu menanggung biaya operasional. Penurunan aktivitas ekonomi tidak hanya mempengaruhi sektor formal tetapi juga sektor informal yang sangat bergantung pada mobilitas dan interaksi sosial. Berdasarkan perhitungan Bappenas, kehilangan daya beli masyarakat akibat *loss of income*¹⁰ diperkirakan mencapai Rp 374,4 triliun, terutama disebabkan oleh penurunan jam kerja di sektor industri dan pariwisata yang merupakan salah satu pilar penting ekonomi Indonesia (Monoarfa, 2022).

Perekonomian Provinsi Jawa Tengah juga sedang mengalami kesulitan. Perekonomian tidak dapat berjalan sejak diberlakukannya PSBB dan PPKM. Pandemi Covid-19 tidak hanya berdampak pada 44.338 UMKM di Jawa Tengah, tetapi juga pada 440 perusahaan yang mengalami kerugian. Akibatnya, 11.438 karyawan telah kehilangan pekerjaan. Covid-19 juga menyulitkan ratusan seniman, pekerja serabutan, pengajar, dan bahkan petani yang berstatus sebagai tenaga honorer (Pranowo, 2022).

¹⁰ Merujuk pada kondisi di mana seseorang mengalami penurunan atau kehilangan pendapatan yang biasanya diterima.

Fokus dari Pemerintah Jawa Tengah setelah menurunnya angka kasus Covid-19 adalah memulihkan ekonomi. Seperti memberikan berbagai bentuk bantuan untuk mendukung UMKM yang terdampak serta menyerahkan bantuan sosial dalam bentuk sembako dan bantuan lainnya untuk mendukung UMKM dan warga terdampak Covid-19. Dalam rangka mendorong kegiatan perdagangan, Jawa Tengah telah mengambil langkah-langkah seperti mendigitalisasi ekonomi dan keuangan sehingga pelaku usaha UMKM dapat membuat dan memanfaatkan platform digital. Dengan dukungan Lapak Ganjar, para pelaku UMKM di Jawa Tengah dapat mengakses platform digital baru yang memungkinkan mereka untuk melakukan transaksi non-tunai dan meningkatkan penetrasi pasar (Humas Jateng, 2023).

Jawa Tengah sudah berusaha untuk memulihkan kondisi perekonomian di daerah namun, masih terdapat beberapa usaha non-UMKM yang tidak mendapatkan bantuan. Usaha non-UMKM ini sangatlah rentan di masa pandemi. Ditambah lagi dengan tidak adanya dukungan finansial dan program pendampingan, membuat usaha non-UMKM ini lebih sulit bertahan dan berkembang di tengah kondisi ekonomi yang tidak menentu. Beberapa pelaku usaha non-UMKM tidak mendapatkan perhatian yang cukup dari pemerintah, sehingga mereka harus berjuang lebih keras untuk bisa tetap bertahan. Menurut Ganjar Pranowo (2022), Pemerintah Jawa Tengah berupaya keras untuk membuat kebijakan yang efektif selama dan setelah pandemi COVID-19, terlepas dari kenyataan bahwa mereka memiliki sumber daya yang terbatas di bidang ini.

Queensland menunjukkan performa yang baik dalam mengelola situasi selama pandemi Covid-19 dan pada periode setelahnya. Jauh berbeda dengan Jawa Tengah, yang kesusahan dalam penanganan Pandemi Covid-19. Queensland berhasil mencatat jumlah kasus Covid-19 yang paling rendah di antara semua negara bagian di Australia, dengan angka kasus mencapai 24,22 per 100.000 penduduk dan tingkat kematian akibat Covid-19 sebesar 0,12 per 100.000 penduduk sepanjang tahun 2020. Keberhasilan ini sebagian besar disebabkan oleh kebijakan pemerintah Queensland yang ketat dan diterapkan dengan tepat waktu. Ketika kasus Covid-19 pertama kali terdeteksi di Queensland, Perdana Menteri Annastacia Palaszczuk segera bertindak dengan menyatakan Covid-19 sebagai darurat kesehatan masyarakat, menjadikannya pemimpin negara bagian pertama yang mengambil langkah tersebut. Setelah itu, pemerintah memberlakukan kebijakan lockdown yang mencakup pembatasan pertemuan massal, penutupan bisnis yang dianggap tidak esensial, dan peningkatan pengawasan di perbatasan antar negara bagian, serta menerapkan persyaratan karantina yang ketat untuk membatasi penyebaran kasus Covid-19 lebih lanjut (Vogler et al., 2023).

Pada tahun 2021, setelah angka kasus Covid-19 di Queensland perlahan mulai menurun, Pemerintah Queensland melakukan beberapa upaya pemulihan. Berdasarkan laporan dari *Queensland Economic Recovery Plan* (2022) Pertama-tama, Queensland melakukan upaya untuk kesehatan masyarakat demi kesiapan menghadapi pandemi yang mungkin saja kembali. Upaya ini mencakup peningkatan kapasitas rumah sakit, program vaksinasi yang menyeluruh, dan kampanye kesehatan publik untuk memastikan masyarakat tetap waspada terhadap

potensi lonjakan kasus di masa depan. Queensland juga melakukan pengembangan sumber daya masyarakat dengan meningkatkan keterampilan dan kemampuan adaptasi tenaga kerja melalui berbagai program pelatihan dan pembelajaran. Queensland mendukung inisiatif yang membantu pekerja mengembangkan keterampilan baru yang relevan dengan kondisi pasca Covid-19, seperti keterampilan digital dan teknologi.

Pada bidang ekonomi Queensland mendukung usaha kecil yang merupakan tulang punggung perekonomian untuk bangkit pasca Covid-19. Dengan memberikan bantuan keuangan, keringanan pajak, dan program pelatihan bisnis. Kemudian, Queensland melakukan upaya untuk menambah lapangan kerja dengan melakukan diversifikasi industri untuk mengurangi angka pengangguran yang meningkat selama pandemi Covid-19. Selanjutnya, Queensland melakukan investasi dalam proyek-proyek besar seperti transportasi, energi, dan fasilitas umum. Pembangunan tersebut berfokus pada pembangunan infrastruktur yang mendukung pemulihan, ketahanan, dan kesejahteraan jangka panjang. Hal tersebut tidak hanya meningkatkan kualitas hidup tetapi juga menciptakan ribuan lapangan kerja baru (Queensland Government, 2022).

Queensland juga melakukan pengembangan wilayah melalui pengembangan sektor pertanian dan sumber daya alam untuk menarik wisatawan dan investasi asing. Pemerintah Queensland menggalakkan program-program yang mendorong pertanian berkelanjutan dan pemanfaatan sumber daya alam yang bertanggung jawab, yang tidak hanya meningkatkan pendapatan daerah tetapi juga memastikan keberlanjutan lingkungan. Perekonomian Queensland tumbuh lebih

cepat dibandingkan negara bagian lain di Australia, dengan pertumbuhan sebesar 2,4%. Selain itu, Queensland mengalami surplus anggaran selama lima tahun terakhir dan memiliki lebih dari \$19 miliar anggaran kesehatan yang dapat digunakan untuk investasi jangka panjang. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa Queensland mampu pulih dari krisis Covid-19 dengan cepat dan efektif, berkat strategi pemulihan yang komprehensif dan berfokus pada berbagai aspek vital perekonomian dan masyarakat (Queensland Government, 2022). Tak hanya itu, Queensland juga memulai komunikasi dengan Jawa Tengah perihal keadaan Jawa Tengah. Menurut penjelasan dari Ibu Eka

Dalam hal ini beruntungnya Jawa Tengah memiliki Sister Province Queensland. Pemerintah Queensland stand by us, mereka membantu kami, mulai bertanya bagaimana situasi kondisi dan bantuan apa saja yang sudah kami dapat untuk mereka bisa memberikan bantuan yang belum kami dapat ... (Wawancara, 03 Juni 2024).

Komunikasi ini menjadi komunikasi pertama sejak pandemi Covid-19 berlangsung. Melalui komunikasi ini juga Jawa Tengah mengusulkan bantuan perihal pemulihan ekonomi lantaran kebutuhan-kebutuhan dari sektor kesehatan sudah dirasa cukup. Selain itu Jawa Tengah juga meminta pendampingan untuk krisis Covid-19 mengingat keberhasilan Queensland yang mampu pulih lebih cepat dari Pandemi Covid-19. Pada akhirnya Queensland setuju memberikan dana bantuan untuk pemulihan pasca covid-19 sebesar Rp. 20 M serta mendampingi Jawa Tengah untuk bisa bangkit dari Pandemi Covid-19 (Nugroho et al., 2023).

